
Shuttle Diplomacy Indonesia dalam Meretas Jalan Gencatan Senjata di Gaza

Krisman Heriamsal

Universitas Sulawesi Barat

krismanheriamsal24@gmail.com

Submitted: 06 May 2026 Revision: 04 August 2026 Accepted: 12 August 2026

Abstrak

Indonesia melakukan serangkaian kunjungan ke negara-negara pemegang hak Veto pada November 2023. Indonesia yang dibersamai oleh negara-negara OKI melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis, bahkan ke Mahkamah Internasional. Tujuannya adalah mendapatkan dukungan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Penelitian ini mencoba mengkaji Diplomasi Persuasi Indonesia tersebut, mendeskripsikan praktik-praktik diplomasi persuasi yang dilakukan melalui shuttle diplomacy, sekaligus menganalisis tantangan Indonesia dalam langkah diplomatik yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dengan cara studi pustaka dengan sumber-sumber seperti buku, e-book, jurnal, dokumen, dan media daring. Dengan menggunakan konsep Diplomasi Persuasi dan *Shuttle Diplomacy*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa shuttle diplomacy Indonesia yang melibatkan kunjungan ke negara pemegang hak veto merupakan bentuk Diplomasi Persuasi untuk menyamapan persepsi negara-negara tersebut agar gencatan senjata dapat dilakukan di Gaza. Namun, langkah tersebut tidak luput dari tantangan seperti benturan kekuatan besar, persoalan normatif, dan lemahnya kapasitas institusi seperti Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik di Gaza.

Kata Kunci: Diplomasi Persuasi, *Shuttle Diplomacy*, veto, Indonesia, Hamas, Israel, Gencatan Senjata

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina selalu menimbulkan korban jiwa yang signifikan, terutama dari kalangan masyarakat sipil Palestina, begitu juga kerusakan infrastruktur di negara tersebut. Kondisi ini disaksikan pada eskalasi konflik tahun 2014, 2021, hingga yang paling terbaru pasca serangan 7 Oktober 2023 lalu, dimana konflik tersebut telah meninggalkan lebih dari 46.000 warga Palestina selama kurun waktu Oktober 2023 sampai Januari 2025 (Reuters 2025). Tetapi, upaya internasional untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan sangat sulit dicapai. Sebab, beberapa hal seperti sistem veto di Dewan Keamanan PBB, benturan kepentingan negara-negara besar, dan ketidakmampuan diplomasi multilateral untuk menangani konflik saat ini, seringkali menjadi faktor penghambat upaya global dalam mencapai gencatan senjata (Mukhlas 2024), (Vitaloka 2025).

Sistem veto di Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi menyebabkan kegagalan dalam mengesahkan resolusi gencatan senjata di Gaza. Sebab, setiap kali rancangan resolusi diajukan, negara-negara anggota tetap yang memiliki kepentingan berbeda sering kali menggunakan hak veto, sehingga pengesahan resolusi tersebut terhambat. Meskipun mayoritas anggota DK

PBB memberikan dukungan, satu hak veto dari anggota tetap sudah cukup untuk menggagalkan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza. Amerika Serikat, misalnya, secara konsisten memveto rancangan resolusi gencatan senjata di Gaza. Hingga saat ini, AS telah tiga kali memveto resolusi yang menyerukan pentingnya gencatan senjata di Jalur Gaza (CNN Indonesia, 2024). Adapun Inggris dan Prancis juga pernah menggunakan hak veto mereka untuk menolak resolusi serupa di DK PBB pada Oktober 2023. Di tengah keterbatasan internasional tersebut, terbuka pula ruang-ruang bagi aktor-aktor diplomasi non-tradisional, khususnya negara-negara berkembang ataupun *middle power* untuk ikut mengambil bagian dalam upaya global mencapai gencatan senjata di Palestina.

Prinsip politik luar negeri bebas aktif dan statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadi pendorong bagi Indonesia untuk ikut andil dalam mengupayakan gencatan senjata di Gaza. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah diplomasi melalui serangkaian pendekatan bilateral kepada negara-negara pemegang hak veto. Hal ini ditandai dengan adanya serangkaian aktivitas kunjungan pemerintah ke Amerika Serikat (AS), lalu kemudian ke Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis, yang dibersamai oleh negara-negara Organisasi Kerja Sama

Islam (OKI) lainnya (Antara News 2023). Kunjungan ini dilakukan untuk menggalang dukungan terhadap gencatan senjata yang berkelanjutan antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Oleh karena itu, studi ini mengkaji kunjungan Indonesia terhadap kelima negara pemegang hak veto, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya diplomasi tersebut.

Telah banyak peneliti yang mengkaji tentang peranan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Penelitian penulis sebelumnya yang dimuat dalam jurnal Hubungan Luar Negeri dengan judul **Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel**, telah menyoroti berbagai bentuk diplomasi secara umum, baik diplomasi bilateral, multilateral, maupun diplomasi kemanusiaan. Hal ini berbeda dengan kajian yang lebih spesifik dalam studi terbaru ini, sebab menganalisis upaya lobi multilateral Indonesia untuk mendorong gencatan senjata di Gaza di tengah hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini, jika penelitian pertama fokus pada gambaran menyeluruh mengenai strategi diplomasi Indonesia dalam konflik Hamas–Israel, penelitian ini lebih menitikberatkan pada dinamika diplomasi multilateral dan tantangan struktural dalam sistem PBB yang

mempengaruhi efektivitas upaya Indonesia dalam memperjuangkan gencatan senjata di Gaza (Heriamsal dan Brosan Manurung 2024).

Selanjutnya, Syarif Bahaudin Mudore dalam studinya ***Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina*** mengkaji bagaimana peran diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Hasil temuannya dengan menggunakan teori resolusi konflik menyatakan bahwa Indonesia mempunyai peran penting untuk membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui diplomasi. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia konsisten menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian konflik Palestina dan Israel, serta mendukung pentingnya menjaga keberlangsungan kerja UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat) untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi Palestina (Mudore 2019). Mudore memberikan pemahaman yang cukup luas dalam konteks peran penting Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina melalui diplomasi. Hanya saja, ia tidak secara jelas memberikan analisis mendalam tentang peranan dari praktik diplomasi Indonesia terhadap keberadaan konflik Palestina dan Israel.

Penelitian dengan isu serupa yaitu penelitian Dewi Suratiningsih, Dea Puspita,

dan Safira yang berjudul ***Diplomasi Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan Indonesia Dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020***. Mereka menyoroti bagaimana peran diplomasi Pemerintah Indonesia dan *Non-Governmental Organization* (NGO) Kemanusiaan Indonesia dalam isu Palestina pada tahun 2014-2020. Menurut mereka, NGO dan pemerintah Indonesia berperan penting dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan dalam isu Palestina (Suratiningsih 2020). Melalui pendekatan *multi-track diplomacy*, mereka menemukan bahwa pemerintah Indonesia aktif dalam mengirimkan bantuan dan menyuarakan perdamaian di Palestina, baik melalui partisipasi dalam forum internasional seperti PBB maupun dengan mengirimkan bantuan langsung kepada masyarakat Palestina. Selain itu, NGO di Indonesia juga berperan memberikan informasi dan menyalurkan bantuan kepada warga Palestina (Suratiningsih 2020). Studi mereka memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran diplomasi pemerintah Indonesia dan NGO kemanusiaan Indonesia dalam isu Palestina. Namun, mereka tidak memberikan informasi yang mendalam tentang perspektif Israel dan PBB terkait konflik tersebut.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Irfan Gati dan Abd. Hafid yang

berjudul ***Indonesia's Diplomatic Contribution to the Israel-Palestine Conflict Since 1948***. Menurut mereka, Indonesia selama ini sudah konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melalui advokasi solusi dua negara. Dukungan itu diwujudkan melalui berbagai peran, seperti fasilitator, mediator, penggagas, serta partisipan aktif dalam forum-forum internasional. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina, termasuk menentang kebijakan Amerika yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel (Gati dan Hafid 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan tren yang sama. Mereka sepakat atas adanya dukungan Indonesia terhadap Palestina melalui upaya-upaya diplomasi. Hanya saja, penelitian sebelumnya cenderung mengkaji diplomasi Indonesia secara umum, alih-alih spesifik pada praktik diplomasi tertentu. Ia juga belum secara spesifik menyoroti tantangan-tantangan dalam praktik-praktik diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, studi ini secara spesifik mengkaji lobi diplomatik yang dilakukan Indonesia khususnya untuk menyamakan persepsi negara-negara pemegang hak veto agar segera mencapai gencatan senjata di Gaza.

KERANGKA KONSEPTUAL

Diplomasi Persuasi

Studi ini menggunakan konsep Diplomasi Persuasi untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam upayanya menyamakan persepsi negara pemegang hak veto. Secara konseptual, diplomasi persuasi adalah proses mengubah sikap lawan dari "tidak" menjadi "ya" dengan menggunakan teknik-teknik psikologis, hubungan personal yang akrab, serta penerapan strategis dari pengaruh dan ketertarikan alih-alih mengandalkan paksaan (Skriabina 2018).

Diplomasi persuasif adalah praktik mempengaruhi keputusan aktor asing dengan menarik minat, nilai, dan emosi mereka. Tidak seperti diplomasi koersif, yang bergantung pada ancaman atau sanksi, diplomasi persuasif didasarkan pada kekuatan argumen untuk membangun kepercayaan pihak lain. Diplomasi ini berupaya mengubah pandangan lawan bicaranya dengan menyajikan tindakan tertentu sebagai pilihan yang paling logis, bermoral, atau bermanfaat. Perbedaannya dengan pendekatan tradisional adalah fokusnya membujuk pihak lain agar benar-benar setuju dengan opsi yang kita tawarkan, bukan sekadar menghindari hukuman. Sebab, dalam diplomasi tradisional, negara-negara kadang memilih

untuk bertindak berbeda agar bisa menghindari sanksi. Namun, dalam diplomasi persuasi, negara lain mengubah perilaku mereka sebab mereka yakin itu adalah hal yang benar untuk dilakukan (Kerr 2010). Metode ini menggunakan gaya bahasa yang menarik serta hubungan personal. Cara ini seringkali dapat mengubah negosiasi dari pertarungan menang-kalah menjadi upaya tim untuk memecahkan masalah (Skriabina 2018).

Persuasi dalam sistem internasional kontemporer sangat sering digunakan dalam berdiplomasi. Tidak ada negara yang dapat secara sewenang-wenang memaksakan agenda politiknya kepada negara lain di era hubungan ekonomi yang erat tanpa berisiko mendestabilisasi pasar global atau merusak kredibilitasnya di mata dunia. Penggunaan paksaan dianggap tidak lebih efektif atau bertahan lama daripada upaya membujuk orang lain untuk bergabung dalam koalisi atau menerima aturan. Lebih jauh lagi, persuasi memungkinkan suatu negara untuk mengembangkan kekuatan lunak, kemampuan untuk mencapai tujuan melalui daya tarik daripada ancaman kekerasan. Jika suatu negara dapat memberikan contoh yang baik tentang hak asasi manusia, negara lain akan dengan rela mengikuti jejaknya. Hasilnya adalah dunia yang lebih harmonis, di mana peraturan ditegakkan berdasarkan rasa hormat, bukan sekadar

kepatuhan yang didorong oleh intimidasi (Octabiana dkk. 2025), (Skriabina 2018).

Teknik persuasi yang digunakan oleh pemerintah suatu negara biasanya menggunakan teknik-teknik tertentu baik dalam situasi formal maupun informal. Misalnya, ia menggunakan pidato dan dokumen kebijakan yang menggambarkan kepentingan suatu negara sebagai sesuatu yang baik untuk semua orang. Yang kedua adalah Diplomasi Publik. Biasanya, suatu negara membangun hubungan dengan masyarakat negara lain melalui acara budaya, beasiswa, dan media. Ketika mendukung masyarakat suatu gagasan, hal itu menyebabkan pemerintah mereka bekerja sama. Yang kedua adalah pertemuan pribadi di mana para pemimpin dapat berbicara secara bebas. Suasana seperti ini memungkinkan pemimpin mengubah pendiriannya. Keempat dengan memberikan bantuan seperti dukungan teknis, persetujuan visa, atau undangan pada acara-acara penting untuk mendorong kerja sama tim. Terakhir dicapai dengan kerja sama yang ilmiah melalui komunitas epistemik. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan data dan ahli netral untuk mendukung argumen. Ketika seorang ilmuwan menjelaskan suatu risiko, hal itu lebih seperti fakta daripada tuntutan politik (DiploFoundation 2021).

Shuttle Diplomacy

Beberapa dimensi dalam konsep *Shuttle Diplomacy* seperti, perjalanan pemimpin negara untuk misi tertentu, menjadi perantara dalam upaya perdamaian, dan strategi pertemuan dengan pemimpin negara-negara, membuat konsep *Shuttle Diplomacy* menjadi pendekatan yang tepat untuk mengkaji kebijakan luar negeri Indonesia mengenai upaya gencatan senjata di Gaza. Beberapa dimensi tersebut sangat relevan untuk menjelaskan praktik-praktik diplomasi yang berhubungan dengan upaya penyelesaian konflik Hamas-Israel di Gaza.

Shuttle Diplomacy merupakan praktik diplomasi yang bekerja untuk memfasilitasi negosiasi antara dua atau lebih pihak yang sedang berkonflik. Istilah "*shuttle*" mengacu pada pergerakan mediator tersebut secara ulang-alik, yang terus-menerus bergerak ke berbagai lokasi untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, *Shuttle Diplomacy* adalah gambaran situasi negosiator melakukan kunjungan-kunjungan ke sejumlah pihak yang dianggap memiliki keterlibatan atau hubungan langsung maupun tidak langsung dengan konflik yang terjadi. Pada strategi diplomasi ini, negosiator akan melakukan kunjungan dan pertemuan secara langsung dengan para pemimpin dunia secara terpisah. Upaya diplomasi ini dilakukan karena para pemimpin pihak yang berperang sering kali enggan bertemu secara langsung

atau bahkan tidak mengakui satu sama lain secara formal. Oleh karena itu, menemui secara terpisah dengan pihak-pihak terkait saat tidak ada alternatif lain dapat membantu mengatasi masalah-masalah mendesak seperti konflik bersenjata dan membuka jalan bagi perundingan lanjutan (Hoffman 2011).

Shuttle Diplomacy digunakan ketika terdapat hambatan dalam penyelesaian sebuah konflik. Pada saat konflik semakin berkepanjangan dan mengalami eskalasi yang signifikan, dimana pihak yang terlibat sulit untuk bertemu secara tatap muka, saat itulah *shuttle diplomacy* bekerja. Dengan demikian, mediator akan bertindak sebagai penghubung antara kedua pihak, membawa pesan, mengamati sikap, dan menyampaikan informasi untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. *Shuttle Diplomacy* dapat menjadi alat yang efektif dalam menengahi konflik atau perundingan yang sensitif. Dalam metode diplomasi ini, mediator sering kali berasal dari negara yang punya posisi tawar untuk memberikan dorongan bagi para pihak untuk memberikan kesempatan pada penyelesaian sebuah konflik (Brahm dan Burgess 2003).

Selain itu, studi ini menggunakan konsep Diplomasi Persuasi untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam upayanya

menyamakan persepsi negara pemegang hak veto. Secara konseptual, diplomasi persuasi adalah proses mengubah sikap lawan dari "tidak" menjadi "ya" dengan menggunakan teknik-teknik psikologis, hubungan personal yang akrab, serta penerapan strategis dari pengaruh dan ketertarikan alih-alih mengandalkan paksaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebab data-data yang digunakan untuk mencapai kesimpulan penelitian sangat bergantung pada bukti-bukti yang sifatnya non-numerik sebagaimana yang biasa digunakan dalam studi kuantitatif (Mahoney dan Goerts 2006). Penelitian ini berbasis studi kepustakaan, yang menggunakan metode narrative literature review dan teknik analisis isi kualitatif. Pendekatan ini sengaja sebab kajian mengenai diplomasi persuasi Indonesia dalam isu di Gaza bersifat multidimensional dan dinamis. Dalam konteks ini, isu tersebut tidak hanya berhubungan dengan kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga sangat berkaitan dengan realitas politik internasional di Timur Tengah, diplomasi multilateral, hukum internasional, hingga dinamika opini publik domestik dan internasional. Oleh karena itu, studi ini

membutuhkan pendekatan yang dapat menjembatani antara dokumen kebijakan negara, pernyataan diplomatik suatu negara, dan literatur akademik hingga efektivitas diplomasi persuasi.

Tinjauan pustaka naratif digunakan untuk membahas perkembangan penelitian akademis dan diskusi kebijakan tentang diplomasi Indonesia, resolusi konflik di Gaza, dan konsep persuasi dalam hubungan internasional. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis literatur dengan berbagai fokus, tujuan, dan pendekatan teoritis, mulai dari studi diplomasi, studi perdamaian dan keamanan, hingga komunikasi politik dan dampak internasional. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan pustaka naratif digunakan tidak hanya sebagai ringkasan deskriptif penelitian, tetapi lebih sebagai dasar untuk menganalisis diplomasi persuasif Indonesia, strategi negosiasi, dan upaya Indonesia untuk mempengaruhi aktor-aktor kunci guna mencapai gencatan senjata di Gaza.

Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi, pernyataan politik, pernyataan pribadi, dan dokumen kelembagaan yang mencerminkan narasi resmi pemerintah Indonesia dan faktor-faktor yang berkaitan dengan upaya gencatan senjata di Jalur Gaza. Korpus data

primer dalam penelitian ini terdiri dari pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia tentang situasi di Jalur Gaza dan upaya gencatan senjata; pernyataan dari Presiden dan Menteri Luar Negeri tentang diskusi mengenai isu Palestina dan situasi di Timur Tengah; dan pernyataan dari Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB tentang konflik Gaza, yang akan dianalisis untuk menentukan posisi dan pengaruh Indonesia. Data Sekunder sebagai sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal, buku teks, artikel ilmiah, dan artikel dari bidang penelitian tentang urusan Indonesia, kebijakan luar negeri, resolusi konflik Israel-Palestina, persepsi perdamaian internasional, PBB, dan politik Timur Tengah.

HASIL DAN DISKUSI

Sepak Terjang Diplomasi Indonesia terkait Isu Palestina

Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, selain mengakui kemerdekaan Indonesia, Palestina memberikan dukungan penting dalam perjuangan Indonesia memperoleh pengakuan internasional. Sejak saat itu, Indonesia terus memperkuat komitmennya terhadap kedaulatan dan hak-hak Palestina. Dukungan ini secara konsisten dilakukan dalam setiap periode pemerintahan, mulai dari era Sukarno

hingga Prabowo Subianto saat ini (Saragih 2019). Selain didasari oleh solidaritas sesama negara Islam, dukungan terhadap Palestina sejalan dengan cita-cita luhur Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tentang hak segala bangsa untuk merdeka. Dalam sebuah pidatonya, Sukarno pernah menegaskan bahwa jika kemerdekaan bangsa Palestina tidak diserahkan kepada rakyat Palestina, maka bangsa Indonesia akan menentang penjajahan Israel (Kementerian Sekretariat Negara 2016).

Komitmen ini diperkuat dengan tidak mengakui proklamasi negara Israel pada tahun 1948 (Muttaqien 2013). Sebaliknya, pada 11 November 1988 di era pemerintahan Suharto, Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina (Sidiq dkk. 2024). Indonesia juga menolak partisipasi Israel dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 (Saragih 2019). Pendekatan serupa juga dilakukan ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 pada tahun 1962. Presiden Sukarno secara tegas tidak mengizinkan Israel untuk berpartisipasi dalam acara tersebut (Hendarto 2025).

Di era pemerintahan Suharto, beredar isu bahwa Indonesia secara diam-diam melakukan kerja sama militer terbatas dengan Israel melalui pembelian 28 pesawat tempur A-4 Skyhawk dari Israel oleh TNI AU, yang memungkinkannya mendapatkan

pelatihan teknis dari Israel melalui Singapura (Hendarto 2025). Namun demikian, dukungan terhadap kebebasan Palestina tetap menjadi komitmen Indonesia di era Suharto. Saat itu, Indonesia bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tahun 1969 (Zuhdi dkk. 2024). Salah satu misinya adalah memperkuat kerja sama antar negara-negara Islam untuk mendukung penyelesaian pendudukan Israel di Palestina. Di dalamnya, Indonesia aktif menyuarakan dukungan kepada Palestina, serta secara konsisten menggalang dukungan dari negara anggota OKI untuk mendukung pembebasan Palestina (Rukmana dan Kurniawanti 2024). Dalam beberapa kunjungan Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Suharto konsisten menegaskan dukungan Indonesia kepada Palestina (Rachmadita 2023). PLO sendiri didirikan sebagai representasi Palestina di kancah internasional, dan Indonesia mengakui keberadaannya sejak tahun 1974 (Ahmad dan Aslamiah 2015).

Pasca reformasi, secara khusus era pemerintahan BJ. Habibie, tidak ada dukungan yang terlalu signifikan dari Indonesia terhadap Palestina. Sebab, selain karena durasi pemerintahan B. J. Habibie yang hanya berlangsung selama satu tahun, di masa ini pula Indonesia memasuki transisi pemerintahan dan pemulihan pasca

reformasi. Pada masa ini, pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan domestik, terutama yang berkaitan dengan stabilitas politik dan ekonomi, daripada berfokus pada isu internasional. Namun demikian, sikap Indonesia dalam mendukung pembebasan Palestina dari pendudukan Israel tidak mengalami perubahan. Pada masa itu, BJ Habibie turut terlibat dalam membentuk Forum D-8, forum kerja sama ekonomi negara-negara berkembang Muslim, dimana isu Palestina sering dibahas di dalamnya (Rukmana dan Kurniawanti 2024). Indonesia juga terus aktif di OKI untuk menyuarakan penyelesaian konflik di Timur Tengah. Ketika B.J. Habibie wafat, banyak umat Muslim di Gaza menggelar doa dan penghormatan kepada presiden ketiga Indonesia tersebut (Fajriyah dan Setiawati 2025).

Di era pemerintahan Gus Dur, Indonesia sempat memikirkan untuk membangun hubungan dengan Israel. Sebab, bagi Gus Dur, sulit menjadi mediator antara Israel dan Palestina jika Indonesia hanya menjalin hubungan dengan salah satu negara tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, menjalin hubungan dengan Israel akan memungkinkan Indonesia secara lebih mudah menjadi penengah dalam konflik yang ada (Roesnadi 2023). Kebijakan Gus Dur ini didasarkan pada prinsip “mengubah musuh menjadi teman”. Selain

itu, sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia ingin memperkuat posisi tawar di Timur Tengah dengan berperan aktif dalam upaya perdamaian (Fajriyah dan Setiawati 2025). Keinginan ini semakin diperkuat oleh tindakan serupa yang dilakukan oleh Mesir dan Israel, yang menjalin hubungan dengan Israel. Tetapi, sikap Gus Dur menuai kritik dari banyak masyarakat Indonesia melalui berbagai aksi solidaritas (Rukmana dan Kurniawanti 2024). Tekanan ini kemudian membuat pemerintah Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas dalam mengecam serangan Israel. Hal ini ditandai dengan siaran pers pemerintah yang berjudul “Hentikan Serangan terhadap Palestina” (Fajriyah dan Setiawati 2025).

Megawati Sukarnoputri sejalan dengan kebijakan Sukarno. Selama era pemerintahannya, tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Ia juga konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, mengutuk keras aksi militer Israel, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina (Widjajanto 2025). Saat kunjungan Sekjen PBB ke Indonesia tahun 2003, Megawati mempertanyakan langsung kepada Kofi Annan mengenai komitmen PBB dalam menangani konflik tersebut (Tempo 2003). Dalam beberapa kesempatan, Megawati juga berusaha menentang persepsi global bahwa Palestina adalah teroris. Ia berusaha menampilkan

rakyat Palestina sebagai pejuang untuk kemerdekaan mereka bahwa pendudukan Israel (Rukmana dan Kurniawanti 2024). Saat itu, Indonesia turut menjalankan diplomasi bilateral dengan Amerika Serikat untuk menghentikan konflik di Timur Tengah (Anriani 2023).

Kepemimpinan Indonesia sebagai mediator penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya Israel-Palestina kian berlanjut di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sebuah pidatonya tahun 2007, SBY mengatakan bahwa:

"Diplomasi dan kontribusi nyata Indonesia untuk menyelesaikan konflik ini secara adil dan bermartabat akan terus dijalankan -- Indonesia berharap proses perundingan damai menuju terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, segera dapat dilanjutkan kembali secara lebih efektif" (Kementerian Sekretariat Negara RI 2007).

Selain itu, di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia secara konsisten mendorong rekonsiliasi antara faksi Hamas dan Fatah sebagai langkah krusial menuju kemerdekaan Palestina. Hal tersebut dapat dilihat saat ia memfasilitasi tempat perundingan antara Hamas dan Fatah (Setiawati 2024). Menjelang akhir

jabatannya sebagai presiden, SBY, melalui surat kepada pemimpin dunia tentang krisis kemanusiaan di Gaza, menyampaikan seruan moral dan desakan kemanusiaan yang tegas untuk segera menghentikan kekerasan di Gaza. Dalam surat tersebut SBY secara eksplisit menyerukan kepada para pemimpin dunia, khususnya Israel dan Hamas, untuk segera menghentikan operasi militer dan mewujudkan gencatan senjata, karena operasi tersebut dinilai semakin "tidak pandang bulu". Sebagai Presiden negara dengan penduduk Muslim terbesar, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keprihatinan ini di kancah global, presiden negara dengan penduduk Muslim terbesar, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keprihatinan ini di kancah global dan merasa perlu mengeluarkan teriakan moral sebagai langkah terakhir untuk menekan para pemimpin dunia agar mengambil tanggung jawab kolektif dan memaksakan perdamaian (Yudhoyono 2014).

Dukungan Indonesia terhadap Palestina semakin kuat di era Joko Widodo. Boleh dikatakan bahwa di masa inilah komitmen Indonesia terhadap pembebasan Palestina dari pendudukan Israel cukup signifikan. Sebab, selain presiden, Menteri Luar Negeri juga secara aktif terlibat dalam menunjukkan komitmen dukungan tersebut.

Beberapa bulan setelah Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia, ia menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa komunitas internasional harus bersama-sama mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Jokowi menegaskan bahwa dunia (termasuk Indonesia) memiliki utang moral yang belum dibayar kepada rakyat Palestina. Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti bahwa akar masalahnya adalah penjajahan dan ketidakadilan yang berkepanjangan, bukan hanya perang saat ini. Dunia dinilai tidak berdaya bukan karena tidak mampu secara militer, tetapi karena gagal menghentikan penindasan struktural yang sudah berlangsung lama. Pernyataan Jokowi menekankan pada solusi politik jangka panjang, yaitu mendukung lahirnya negara Palestina yang merdeka. Ia mengajak semua pihak untuk tidak berpaling dan terus berjuang sampai tujuan kemerdekaan itu tercapai (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2015).

Pada Konferensi Luar Biasa OKI di Turki tahun 2017, Joko Widodo mengusulkan 6 poin yang berkaitan dengan upaya AS untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam usulannya, Joko Widodo mengusulkan beberapa hal yaitu: OKI menolak pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel oleh AS; Negara-

negara OKI memiliki kedutaan besar di Tel Aviv; OKI mendorong negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Palestina; OKI mendorong peninjauan kembali terhadap negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel; OKI meningkatkan bantuan ekonomi dan bantuan kemanusiaan ke Palestina; terakhir, Negara OKI mendorong organisasi multilateral lainnya untuk mendukung Palestina. Upaya ini berhasil mendorong Mesir mengajukan resolusi penolakan terhadap kebijakan AS yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Hasilnya, resolusi tersebut berhasil dibawa ke Sidang DK PBB (Wangke 2018).

Selain itu, melalui *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development* (CEAPAD), Indonesia berkomitmen untuk mendorong perekonomian Palestina melalui kebijakan bebas bea masuk untuk produk kurma dan zaitun dari Palestina. Selain itu, Indonesia juga mendukung Palestina dengan memberikan pelatihan infrastruktur, teknologi, pertanian, dan capacity building lainnya (Fathun dkk. 2025). Dalam Sidang Dewan Keamanan PBB tahun 2019, Menteri Luar Negeri RI saat itu, Retno Marsudi, menyampaikan bahwa solusi dua negara, mengakui keberadaan Palestina dan Israel, adalah solusi terbaik untuk penyelesaian konflik ini (Wulandari dkk. 2024). Dalam

Debat Terbuka DK PBB tahun 2024 di New York, Retno Marsudi dalam pidatonya secara gamblang menegaskan kembali bahwa Indonesia memiliki konsistensi dan keseriusan dalam memperjuangkan Palestina. Ia juga menyampaikan pesan tegas kepada komunitas internasional bahwa Indonesia selalu berada di garis terdepan dan tidak akan pernah absen dalam membela keadilan (Pratama 2025).

Upaya Global untuk Perdamaian Palestina–Israel

Setelah Palestina berada di bawah pemerintahan Inggris selama lebih dari dua dekade, pada tahun 1947, persoalan mengenai Palestina kemudian diserahkan oleh Inggris ke PBB. Sebagai langkah pertama, PBB membentuk sebuah Komite Khusus PBB untuk Palestina (UNSCOP) yang terdiri dari perwakilan 11 negara. Mereka lalu merekomendasikan beberapa opsi solusi yaitu, pembentukan dua negara terpisah yang saling terhubung secara ekonomi, dan pembentukan satu negara dwibangsa yang terdiri atas wilayah otonom Yahudi dan Palestina. Namun, pihak Arab menolak kedua usulan tersebut, sementara komunitas Yahudi menerima usulan pertama dan menolak usulan kedua. UNSCOP kemudian memodifikasi usulan untuk membagi wilayah Palestina tersebut, dan dilakukan pemungutan suara di Majelis

Umum PBB pada 29 November 1947. Resolusi 181 tersebut disahkan dengan 33 suara setuju, 13 suara menolak, dan 10 negara abstain. Resolusi ini menyerukan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Arab dan negara Yahudi, dengan Kota Yerusalem ditetapkan sebagai *corpus separatum* (wilayah terpisah) yang akan dikelola di bawah rezim internasional khusus (United Nations 1947).

Selain itu, DK PBB juga pernah mengeluarkan Resolusi 338 tahun 1973 sebagai upaya untuk menghentikan perang tahun 1973 dan mendorong perdamaian konflik Arab–Israel sesuai dengan prinsip dalam resolusi-resolusi sebelumnya (UN Security Council 1974). Lagi, di tahun 2002, PBB mengeluarkan seruan resmi mengenai pendudukan Israel atas Palestina, melalui resolusi 1402. Inti dari resolusi ini menekankan bahwa kekerasan di wilayah Palestina akibat pendudukan Israel harus segera dihentikan, dan proses perdamaian Israel–Palestina dilanjutkan melalui negosiasi dan langkah-langkah membangun kepercayaan (UN Security Council 2002). PBB juga pernah mengeluarkan resolusi 2334 tahun 2016. Resolusi ini mengutuk dan menolak aktivitas pendudukan Israel di atas wilayah Palestina maupun Yerusalem Timur, dan menuntut penghentian semua aktivitas permukiman tersebut. Resolusi ini diadopsi pada 23 Desember 2016 pada pertemuan

ke-7853 DK PBB dengan suara 14 mendukung, 0 menolak, dan 1 abstain, yaitu Amerika Serikat.

Konflik Hamas-Israel pada Oktober 2023 lalu membuka babak baru dalam keberlanjutan pendudukan Israel atas Palestina. Saling respons serangan kedua pihak pada akhirnya justru memicu krisis kemanusiaan terburuk yang pernah ada (Heriamsal dan Broson Manurung 2024). Hingga pada 17 September 2025, lebih dari 65 ribu warga Palestina di Gaza telah meninggal akibat konflik berkepanjangan tersebut (Ahdiat 2025).

Walaupun Dewan Keamanan PBB telah menerbitkan resolusi untuk gencatan senjata, tetapi upaya itu ditentang oleh beberapa anggota tetap DK PBB, dan beberapa negara yang bukan pemegang hak veto. Pada 25 Oktober 2023, China dan Rusia menggunakan hak veto mereka untuk memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh Amerika Serikat. Penolakan tersebut didasari oleh fakta bahwa rancangan resolusi dari AS tidak menuntut gencatan senjata penuh, tetapi hanya meminta penghentian pertempuran dalam waktu terbatas untuk meluncurkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Sementara itu, dua usulan resolusi dari Rusia terkait penghentian pertempuran di Jalur Gaza juga kandas setelah ditolak oleh AS, Inggris, Filipina, dan Jepang. Penolakan

tersebut didasari oleh anggapan bahwa isi resolusi tersebut tidak tegas mengecam Hamas. Hingga 26 Oktober 2023, sebanyak empat rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB telah gagal karena penolakan dari negara-negara anggota tetap lembaga tersebut (Salim 2023).

Pada Januari 2024, *International Court of Justice* (ICJ) mengambil langkah darurat setelah tuntutan dari Afrika Selatan terhadap Israel atas pelanggaran Konvensi Genosida. Meskipun demikian, Mahkamah Internasional (ICJ) tidak mengabulkan permintaan Afrika Selatan untuk memberlakukan gencatan senjata. Sebaliknya, putusan Mahkamah hanya mewajibkan Israel untuk membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Meskipun PBB dan Uni Afrika telah mengupayakan berbagai resolusi untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, namun langkah tersebut seringkali terhalang oleh upaya beberapa negara yang memiliki kepentingan atas konflik yang ada. Amerika Serikat, misalnya, dalam beberapa kesempatan di Dewan Keamanan PBB memanfaatkan hak veto untuk membatalkan resolusi gencatan senjata pada konflik Palestina-Israel. Komunitas Internasional mengetahui bahwa Amerika Serikat adalah sekutu dari Israel, jadi akan sangat wajar jika negara tersebut (Tegenaw dan Zou 2024).

Diplomasi Persuasi Indonesia untuk Menghasilkan Gencatan Senjata

Kegagalan komunitas dan institusi internasional khususnya DK PBB, dalam menghasilkan gencatan senjata di Gaza akibat penolakan dari anggota tetap, menjadi dasar bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi persuasi kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh untuk mencapai gencatan senjata, khususnya anggota tetap DK PBB. Ada beberapa kunjungan pemerintah Indonesia dalam upaya menghasilkan gencatan senjata, yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk Diplomasi Persuasi dalam bentuk *Shuttle Diplomacy*

Beberapa pekan pasca konflik Hamas-Israel mulai, Pemerintah Indonesia, Joko Widodo, berkunjung ke AS membawa beberapa misi penting mengenai konflik tersebut. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden AS, Joe Biden, Jokowi membahas kondisi masyarakat sipil di Gaza yang terdampak perang. Oleh karena itu, Indonesia kembali mendorong dan menekankan kepada pemerintah AS mengenai urgensi gencatan senjata di Gaza, sekaligus melancarkan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin. Indonesia juga kembali mengingatkan tentang pentingnya mendorong solusi dua negara untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Jokowi meminta kepada AS

untuk menggunakan pengaruhnya, khususnya kedekatan hubungan dengan Israel, untuk segera menghentikan perang di Gaza (BBC News 2023), (detikcom 2023).

Terdapat dua alasan mengapa pertemuan bilateral ini signifikan. Pertama, hubungan yang baik antara Israel dan Amerika dapat menjadi ruang bagi AS untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Israel sehubungan dengan konflik yang terjadi di Gaza. Misalnya, AS bisa meminta secara diplomatik agar Israel menghentikan serangan ke Gaza. Ia juga dapat mengambil peran dengan menawarkan mediasi atau perundingan damai. Bahkan, AS dapat memberikan tekanan politik dan menggunakan pengaruh ekonomi atau keamanan untuk mempengaruhi Israel. Peran seperti ini pernah terjadi pada Perang Yom Kippur tahun 1973. Ketika perang melawan Israel berkembang dan berisiko memicu konfrontasi yang lebih besar antara kekuatan dunia, Uni Soviet mendorong Mesir menerima gencatan senjata. Saat itu, Presiden Mesir Anwar Sadat mulai menunjukkan minat pada gencatan senjata. Pemimpin Soviet saat itu, Leonid Brezhnev, mengundang Henry Kissinger ke Moskow untuk merundingkan usulan gencatan senjata bersama AS-Uni Soviet yang kemudian menjadi Resolusi DK PBB 338 (Quandt 1976).

Kedua, sebagai pemegang hak veto, AS juga secara konsisten selalu memveto rancangan resolusi gencatan senjata di Gaza dalam Dewan Keamanan PBB. Bahkan, hingga saat ini, AS telah memveto sebanyak tiga kali rancangan resolusi yang menyerukan pentingnya gencatan senjata di jalur Gaza (CNN Indonesia, 2024). Oleh karena itu, diplomasi persuasi dijadikan sebagai momentum strategis bagi Indonesia untuk melakukan pendekatan terhadap Amerika Serikat guna mendorong dukungan terhadap upaya gencatan senjata di Gaza, alih-alih menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi yang diajukan dalam DK PBB.

Diplomasi persuasi Indonesia juga terlihat dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Tiongkok. Pada tanggal 20 November 2023, Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Tiongkok bersama dengan beberapa pemimpin negara-negara Islam lainnya. Sama seperti pertemuan Indonesia dan AS sebelumnya, kunjungan ke Tiongkok merupakan bagian dari misi perdamaian di Gaza dengan mendorong negara anggota tetap DK PBB untuk mendukung gencatan senjata. Tiongkok sendiri adalah salah satu negara yang sangat diperhitungkan di forum DK PBB, dimana ia merupakan salah satu pemegang hak veto. Dalam kunjungan ini, Indonesia bersama negara-negara anggota OKI

membahas tentang urgensi gencatan senjata, sekaligus mengharapkan keterlibatan Tiongkok di DK PBB agar gencatan senjata dapat dicapai (Tian and Chen, 2023).

Posisi tawar dan pengaruh Tiongkok di DK PBB tentu menjadi pertimbangan Indonesia dalam Diplomasi persuasi ini. Pada bulan November 2023, Tiongkok memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB. Artinya, Tiongkok bisa menggunakan posisinya dalam mengintervensi kebijakan dalam Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan krisis kemanusiaan di Gaza. Selain itu, sebagai salah satu anggota tetap DK PBB, Tiongkok memiliki hak veto yang memberinya kapasitas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan terkait isu-isu strategis dalam Dewan Keamanan. Dalam praktiknya, Tiongkok telah beberapa kali menggunakan hak veto tersebut untuk melindungi kepentingan nasional maupun kepentingan negara-negara sekutunya. Oleh karena itu, melalui pendekatan diplomasi persuasi, Indonesia berupaya memperoleh dukungan Tiongkok terhadap inisiatif gencatan senjata dalam konflik Hamas–Israel, sebagaimana Tiongkok sebelumnya memanfaatkan pengaruh politiknya dalam berbagai isu internasional yang dianggap sejalan dengan kepentingannya.

Diplomasi Persuasi Indonesia juga dapat ditelaah dalam *shuttle diplomacy* ke

Rusia selaku anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada 21 November 2023. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dalam hal ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dibersamai oleh beberapa Menteri Luar Negeri negara OKI yaitu Yordania, Arab Saudi, Palestina dan Mesir. *Shuttle diplomacy* ini dilakukan sebagai bagian dari misi mengupayakan gencatan senjata di Gaza melalui dukungan penuh negara pemegang hak veto seperti Rusia. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan keprihatinan dan kecaman atas pemindahan masyarakat Palestina secara paksa, Retno Marsudi juga menegaskan pentingnya membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan dari pihak manapun (Zaini dkk. 2024, 2023–24).

Diplomasi persuasi ini menjadi signifikan karena beberapa alasan. Pertama, ia menjembatani komitmen Indonesia untuk mengambil peran dalam mengupayakan gencatan senjata di Gaza, dengan berupaya menyamakan persepsi negara pemegang hak veto. Oleh karena Rusia adalah pemegang hak veto di DK PBB, maka diplomasi memberi ruang bagi Indonesia untuk menggalang dukungan Rusia di forum tersebut, terutama dukungan pada resolusi gencatan senjata. Kedua, keberadaan senjata nuklir Rusia memberikan posisi tawar yang kuat dalam perundingan

pengendalian senjata, termasuk upaya mencapai gencatan senjata di Gaza. Ketiga, keterlibatan Rusia dalam konflik internasional selama ini menjadikan perannya dalam Dewan Keamanan PBB sangat signifikan dalam pembentukan kebijakan keamanan global dan penanganan tantangan keamanan internasional yang kompleks. Oleh karena itu, melalui diplomasi persuasi ini, Rusia diharapkan dapat memaksimalkan posisi tawarnya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.

Setelah Rusia, Menteri Luar Negeri melanjutkan *shuttle diplomacy* ke Inggris dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, di London. *Shuttle diplomacy* ini masih terus mengejar tujuannya, yaitu memobilisasi dukungan untuk mengakhiri serangan Israel terhadap Gaza. Beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, Palestina, Yordania, Mesir, Nigeria, dan Liga Arab, turut berpartisipasi dalam kunjungan tersebut. Retno Marsudi menekankan pentingnya menghormati hukum humaniter internasional. Menurutnya, aturan dan hukum berlaku bahkan di masa perang. Perlindungan penduduk sipil dan infrastruktur publik, khususnya rumah sakit, merupakan aspek sentral dari hukum humaniter internasional. Dalam kunjungan itu Indonesia juga menyampaikan bahwa konferensi tentang hak asasi manusia, hukum internasional, dan perlunya

menghormati hukum humaniter internasional saat ini sedang berlangsung di banyak negara di Global South. Oleh karena itu, ia meminta agar Inggris ikut berperan sesuai hukum internasional yang berlaku, termasuk mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza (Ramadhan 2023), (CNN Indonesia 2023).

Pada Oktober 2023, Inggris telah menggunakan hak vetonya di DK PBB untuk menolak resolusi gencatan senjata. Diplomasi Persuasi ini merupakan langkah pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia kepada Inggris, dengan tujuan agar Inggris dapat mendukung upaya gencatan senjata di konflik Hamas dan Israel, daripada mengambil langkah veto terhadap rancangan resolusi. Di samping itu, Inggris merupakan sekutu dari Amerika Serikat, yang tentu memiliki pengaruh dalam Dewan Keamanan PBB. Diplomasi persuasi ini dapat mendorong Inggris untuk berperan sebagai mediator dengan sekutu-sekutunya agar mendukung gencatan senjata di Gaza.

Setelah kunjungan diplomatik berakhir di Inggris, Retno Marsudi dan para menteri luar negeri OKI mengunjungi Prancis pada 24 November. Tujuan mereka tetap sama: untuk mendapatkan dukungan Prancis bagi upaya bersama untuk mengurangi ketegangan di Jalur Gaza akibat konflik antara Israel dan Hamas. Mereka menyerukan kepada Prancis untuk

menggunakan pengaruhnya di Dewan Keamanan PBB untuk menghindari standar ganda dalam masalah Palestina. Indonesia juga menekankan bahwa hukum humaniter internasional harus dihormati oleh semua negara, termasuk saat komunitas internasional merespons situasi di Gaza. Dalam konteks ini, Indonesia dan OKI menegaskan kembali perlunya gencatan senjata segera dan penerapan berbagai langkah untuk meluncurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebagai negara yang cukup diperhitungkan di DK PBB, Indonesia dan OKI mengharapkan kontribusi yang signifikan dari Prancis dalam mendukung upaya gencatan senjata (Pramudyani 2023). Sama seperti negara anggota tetap lainnya, sebagai negara pemegang hak veto, Prancis tentu memiliki posisi tawar dalam mempengaruhi kebijakan di DK PBB. Hal yang tidak kalah penting adalah jaringan hubungan diplomatik yang luas memungkinkan Prancis untuk memobilisasi dukungan dari negara-negara lain dalam menjalankan agenda mereka di Dewan Keamanan, khususnya terkait upaya gencatan senjata di Gaza. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, Prancis dapat memainkan peran penting dalam pembuatan keputusan dan pemeliharaan keamanan di jalur Gaza saat ini.

Diplomasi Persuasi Indonesia juga dapat diidentifikasi dalam kunjungannya ke

Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, pada 23 Februari 2024. Mahkamah Internasional sendiri adalah salah satu aktor yang berpotensi mempengaruhi upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza untuk segera diwujudkan. Beberapa poin penting yang disampaikan Indonesia diantaranya, menolak pendudukan Israel atas Palestina yang dianggap melanggar hukum internasional, mengancam pembangunan permukiman ilegal Israel di Palestina sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional, menuduh Israel melakukan kebijakan apartheid di Palestina, menuntut agar Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas Palestina sebagai tindakan ilegal dan mengakhiri praktik tersebut, dan menekankan bahwa Israel harus memberikan reparasi kepada Palestina dan warganya (Marsudi, 2024).

Diskusi

Rangkaian *shuttle diplomacy* yang dilakukan Indonesia kepada negara-negara pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB menunjukkan upaya untuk mengubah sikap dan persepsi negara-negara tersebut terhadap urgensi gencatan senjata di Gaza melalui pendekatan dialog, argumentasi moral, dan hubungan diplomatik, bukan melalui tekanan atau paksaan. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat

merupakan contoh nyata dari diplomasi persuasi sebagaimana dijelaskan oleh Skriabina (2018) dan Kerr (2010), yaitu mendorong pihak lain menerima suatu kebijakan karena dianggap sebagai pilihan yang tepat dan rasional. Dalam pertemuan dengan Presiden Joe Biden, Indonesia tidak menekan Amerika Serikat, melainkan menekankan dampak kemanusiaan yang dialami masyarakat sipil Gaza, pentingnya bantuan kemanusiaan, serta urgensi solusi dua negara. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berusaha membangun kesadaran moral dan politik Amerika Serikat agar menggunakan pengaruhnya terhadap Israel sekaligus mengurangi kecenderungannya menggunakan hak veto terhadap resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB.

Praktik diplomasi persuasi juga terlihat dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama delegasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke Tiongkok dan Rusia. Dalam perspektif diplomasi persuasi, kedua negara tersebut dipilih karena memiliki kapasitas strategis untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB. Indonesia berupaya menyamakan persepsi dengan menonjolkan aspek kemanusiaan, pentingnya penghentian kekerasan, dan kebutuhan mendesak terhadap akses bantuan bagi masyarakat Gaza. Pendekatan ini sejalan dengan teknik persuasi yang

menekankan penggunaan argumentasi rasional dan nilai-nilai universal untuk memperoleh dukungan pihak lain. Selain itu, keterlibatan negara-negara OKI dalam kunjungan tersebut memperkuat legitimasi pesan yang dibawa Indonesia, sehingga isu gencatan senjata tidak hanya dipandang sebagai kepentingan satu negara, melainkan sebagai tuntutan kolektif masyarakat internasional. Dengan demikian, Indonesia berupaya membentuk keyakinan bahwa dukungan terhadap gencatan senjata merupakan pilihan yang sesuai dengan tanggung jawab Tiongkok dan Rusia sebagai aktor penting dalam pemeliharaan perdamaian internasional.

Lebih lanjut, kunjungan ke Inggris, Prancis, dan Mahkamah Internasional menunjukkan bahwa diplomasi persuasi Indonesia tidak hanya ditujukan kepada pengambil keputusan politik, tetapi juga kepada institusi dan aktor yang memiliki pengaruh normatif dalam sistem internasional. Dalam pertemuan dengan Inggris dan Prancis, Indonesia menekankan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, perlindungan warga sipil, serta perlunya menghindari standar ganda dalam merespons konflik Palestina. Strategi ini mencerminkan karakter diplomasi persuasi yang berupaya membingkai dukungan terhadap gencatan senjata sebagai pilihan yang bermoral, legal, dan sejalan dengan

nilai-nilai internasional. Sementara itu, penyampaian argumen Indonesia di Mahkamah Internasional memperlihatkan penggunaan pendekatan berbasis hukum dan fakta sebagai bentuk persuasi melalui komunitas epistemik, sebagaimana dijelaskan oleh DiploFoundation (2021). Dengan memanfaatkan forum hukum internasional dan melakukan pendekatan langsung kepada negara-negara pemegang hak veto, Indonesia berusaha membangun konsensus internasional bahwa penghentian konflik dan perlindungan warga sipil di Gaza merupakan kebutuhan mendesak yang harus didukung oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB.

Di tengah dinamika konflik Hamas-Israel yang terus memanas dengan serangan darat Israel yang semakin meluas ke Gaza serta memburuknya krisis kemanusiaan yang ditandai dengan lonjakan jumlah korban jiwa yang signifikan, Pemerintah Indonesia tetap secara aktif melakukan diplomasi sebagai wujud nyata komitmen dan konsistensi politik luar negeri, sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil. Hanya saja ada beberapa tantangan Indonesia dalam mencapai tujuan Diplomasi persuasi yang dilakukannya. Pertama, dalam praktik diplomasi persuasi, Indonesia menjalin komunikasi dengan sejumlah

negara, termasuk Amerika Serikat beserta sekutunya. Negara-negara tersebut dikenal secara konsisten memberikan dukungan kepada Israel. Oleh karena itu, sulit untuk mengharapkan Amerika Serikat dan sekutunya bersedia mengakomodasi aspirasi Indonesia demi terwujudnya gencatan senjata, terlebih jika upaya tersebut dinilai merugikan pihak Israel atau bertentangan dengan koridor kebijakan luar negeri mereka terhadap Israel. Selain itu, sikap ketidaknetralan Amerika Serikat dan sekutunya juga tampak jelas dari sejumlah penggunaan hak veto yang mereka lakukan terhadap resolusi gencatan senjata di Gaza dalam forum DK PBB.

Kedua, kelemahan kapasitas institusional DK PBB dalam merespons konflik di Gaza turut menjadi kendala struktural. Meskipun DK PBB memainkan peran sentral dalam perumusan kebijakan serta penyelesaian sengketa internasional, ketidakmampuannya untuk memberikan respons yang cepat dan menemukan solusi yang efektif terhadap krisis tersebut telah menyulitkan upaya diplomasi Indonesia untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kendala ini semakin dipertegas oleh dominasi negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, yang tentu memiliki kepentingan politis dan strategis tersendiri di kawasan Timur Tengah. Dengan adanya dominasi tersebut, DK PBB

menghadapi kesulitan struktural untuk memaksakan kehendak atau menekan negara-negara besar agar bertindak di luar kepentingannya, mengingat negara-negara besar pada hakikatnya tidak akan membiarkan institusi internasional memiliki kewenangan koersif yang dapat digunakan untuk memaksa mereka. Kondisi sistemik semacam ini pada akhirnya secara langsung menghambat upaya diplomatik Indonesia dalam mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Ketiga, tantangan yang dihadapi bersifat normatif dan institusional, yakni berkaitan dengan norma, aturan, serta nilai-nilai yang dianut oleh institusi internasional, khususnya PBB. Salah satu norma fundamental yang dijunjung tinggi oleh PBB termanifestasi dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Genocide Convention). Konvensi ini mengamanatkan bahwa seluruh negara anggota PBB menyepakati genosida sebagai kejahatan luar biasa yang wajib diberantas, sekaligus mewajibkan setiap negara untuk mencegah dan menghukum para pelakunya melalui pengadopsian peraturan perundang-undangan yang relevan di tingkat nasional. Meskipun konvensi internasional tersebut telah berlaku selama hampir tujuh dekade, Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan kesediaan politik untuk meratifikasinya.

Sikap abstain ini secara langsung melemahkan efektivitas diplomasi Indonesia dalam merespons krisis kemanusiaan di Gaza, yang oleh berbagai pihak diduga sebagai kejahatan genosida. Akibatnya, dalam konteks ini Indonesia kehilangan posisi tawar yang memadai ketika mengadvokasi isu tersebut di forum internasional, berbeda halnya dengan Afrika Selatan yang secara proaktif telah mengajukan gugatan terkait dugaan genosida ke Mahkamah Internasional. Meskipun Indonesia telah menyampaikan pernyataan lisan di hadapan Mahkamah Internasional, ketiadaan ratifikasi atas Konvensi Genosida secara signifikan melemahkan kapasitas Indonesia dalam membangun kredibilitas argumentasi serta memperoleh keyakinan dari komunitas internasional terhadap isu yang diadvokasinya. Dalam konteks ini, Indonesia perlu menyadari bahwa status non-ratifikasi tersebut merupakan kelemahan strategis yang melekat dalam pelaksanaan diplomasi kemanusiaannya terkait krisis di Gaza. Lebih lanjut, Indonesia hendaknya segera merefleksikan bahwa tanpa komitmen hukum formal berupa ratifikasi, tindakan aktif yang ditunjukkan dalam mengadvokasi krisis kemanusiaan di Gaza berpotensi dipersepsikan oleh masyarakat internasional sebagai sikap yang ambigu, inkonsisten, dan

kontradiktif secara normatif dengan nilai-nilai yang hendak diperjuangkannya.

KESIMPULAN

Konflik Hamas dan Israel telah menyebabkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan ribuan korban jiwa dan kerusakan besar di wilayah Gaza. Indonesia secara aktif berupaya memediasi konflik ini melalui diplomasi persuasi, dengan melibatkan kekuatan-kekuatan internasional utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis. Namun, upaya tersebut belum berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata, yang disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, terdapat bias dan ketidaknetralan dari beberapa kekuatan besar, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, yang secara konsisten memberikan dukungan kepada Israel. Kedua, adanya keterbatasan institusional di Dewan Keamanan PBB, terutama terkait penggunaan hak veto oleh anggota tetap, yang menghambat implementasi resolusi. Ketiga, Indonesia belum memiliki landasan hukum yang kuat, seperti belum meratifikasi Konvensi Genosida, yang melemahkan kredibilitas serta posisi tawar dalam forum internasional.

Sebagai langkah strategis ke depan, Indonesia harus memperkuat kerangka hukum domestiknya dengan meratifikasi

Konvensi Genosida dan menyesuaikan sistem hukum nasional dengan norma internasional, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas di tingkat global. Selain itu, Indonesia perlu membangun koalisi dengan organisasi regional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna memperkuat tekanan kolektif di forum internasional. Forum multilateral seperti Majelis Umum PBB, yang tidak memberlakukan hak veto, juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong resolusi yang lebih kuat dan mendukung upaya gencatan senjata. Terakhir, Indonesia perlu mengembangkan strategi diplomasi jangka panjang yang tidak hanya merespons krisis, tetapi juga berfokus pada penyelesaian akar konflik Israel-Palestina. Hal ini mencakup dukungan terhadap solusi dua negara dan penguatan perlindungan hukum bagi warga sipil Palestina. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik ini secara lebih signifikan.

REFERENCES

- Ahdiat, Adi. 2025. "Israel Lakukan Genosida di Gaza, Korban Jiwa 65 Ribu Orang | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks." Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68d221f5c7c60/israel-lakukan-genosida-di-gaza-korban-jiwa-65-ribu-orang>.
- Ahmad, Jamaan, dan Saibatul Aslamiah. 2015. "Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Palestina Menjadi Negara Penerima di PBB Tahun 2012." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 2 (2): 1–21.
- Anriani, Anek. 2023. "RELASI INDONESIA-PALESTINA PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 9 (2).
<https://doi.org/10.33172/jdp.v9i2.10825>.
- Antara News. 2023. "Menlu Retno Marsudi dan utusan OKI bertemu Menlu China Wang Yi." Antara News.
<https://www.antaranews.com/video/3832896/menlu-retno-marsudi-dan-utusan-oki-bertemu-menlu-china-wang-yi>.
- BBC News. 2023. "Jokowi desak Biden untuk dorong Israel hentikan serangan ke Gaza, tapi 'tidak ditanggapi.'" BBC News.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz92n6mv2njo>.
- Brahm, Eric, dan Heidi Burgess. 2003. "Shuttle Diplomacy." Beyond Intractability.
https://www.beyondintractability.org/essay/shuttle_diplomacy.
- CNN Indonesia. 2023. "RI Mengadu ke Inggris soal Israel: Perlu Gencatan Senjata Permanen." CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231123224414-120-1028284/ri-mengadu-ke-inggris-soal-israel-perlu-gencatan-senjata-permanen>.
- detikcom. 2023. "Pesan Jokowi ke Biden soal Gencatan Senjata di Gaza Suatu Keharusan." detiknews.
<https://news.detik.com/berita/d-7037040/pesan-jokowi-ke-biden-soal-gencatan-senjata-di-gaza-suatu-keharusan>.

- DiploFoundation. 2021. "Persuasion."
Www.Diplomacy.Edu.
<https://www.diplomacy.edu/topics/persuasion/>.
- Fajriyah, Nurul, dan Siti Muti'ah Setiawati. 2025. "Indonesia's View: Eradicating Colonialism and Supporting Palestine." *Global South Review* 7 (1): 139.
<https://doi.org/10.22146/globalsouth.96776>.
- Fathun, Laode Muhamad, Asep Setiawan, Saepudin, Aldebaran Raihan Revidy, dan Andi Ismira. 2025. "Diplomasi Indonesia untuk Palestina: Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Joko Widodo." *JAWI* 8 (2): 239–49.
<https://doi.org/10.24042/00202582699300>.
- Gati, Muhammad Irfan, dan Abd. Hafid. 2024. "INDONESIA'S DIPLOMATIC CONTRIBUTION TO THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT SINCE 1948." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2 (2): 1–9.
<https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i2.7919>.
- Hendarto, Yohanes Meha. 2025. "Menelusuri Hubungan Indonesia-Israel, dari Era Soekarno hingga Prabowo." Kompas.id, Mei 30.
<https://www.kompas.id/artikel/menelusuri-hubungan-indonesia-israel-dari-era-soekarno-hingga-prabowo>.
- Heriamsal, Krisman, dan Felix Broson Manurung. 2024. "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel." *JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI* 9 (1): 19–48.
<https://doi.org/10.70836/jh.v9i1.44>.
- Hoffman, David A. 2011. "Mediation and the Art of Shuttle Diplomacy." *Negotiation Journal* 27 (3): 263–309.
<https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.2011.00309.x>.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. "Ini Isi Pidato Jokowi yang Mendapat Sambutan Hangat Peserta KAA." kemhan.go.id.
<https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/04/23/ini-isi-pidato-jokowi-yang-mendapat-sambutan-hangat-peserta-kaa.html>.
- Kementerian Sekretariat Negara. 2016. "Pidato Presiden Republik Indonesia." Kementerian Sekretariat Negara.
https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_oleh_presiden_republik_indonesia.

- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2007. "Presiden SBY : Indonesia Berperan Aktif Bagi Penyelesaian Konflik Timur Tengah | Sekretariat Negara." Kementerian Sekretariat Negara. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_sby_indonesia_berperan_aktif_bagi_penyelesaian_konflik_timur_tengah.
- Kerr, Pauline L. 2010. "Diplomatic Persuasion: An Under-Investigated Process." *The Hague Journal of Diplomacy* 5 (3): 235–61. <https://doi.org/10.1163/187119110X508512>.
- Mahoney, James, dan Gary Goerts. 2006. "A tale of two cultures: Contrasting quantitative and qualitative research." *Political Analysis* 14 (3): 227–49. <https://doi.org/10.1093/pan/mpj017>.
- Mudore, Syarif Bahaudin. 2019. "Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina." *Center of Middle Eastern Studies* 12 (2): 170–81. <https://doi.org/10.20961/cmest.12.2.37891>.
- Mukhlis, Muhamad Najib. 2024. "KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT MENOLAK DRAF RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB DI GAZA TAHUN 2023 - 2024." *Global Insight Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 1 (1). <https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2401>.
- Muttaqien, M. 2013. "Domestic Politics and Indonesia's Foreign Policy on the Arab-Israeli Conflict." *Global Strategis* 7 (1): 57–72.
- Octabiana, Arvi, Aan Anisah, Muhammad Arvin Zakiy Fuadi, Syafiqah Nadhira Kusuma, Deriel Pratama Putra, dan Bintang Afifah Nailah Surya. 2025. "Upaya Diplomasi Persuasif dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir antara India dan Pakistan." *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2 (2): 1–7. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i3.4286>.
- Pramudyani, Yashinta Difa. 2023. "Para menlu OKI harapkan dukungan Prancis untuk akhiri krisis di Gaza." Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3838326/para-menlu-okl-harapkan-dukungan-prancis-untuk-akhiri-krisis-di-gaza>.
- Pratama, Raditya Aryasatya. 2025. "Analisis Framing Dan Retorika dalam Teks Pidato Menteri Luar Negeri RI

- Terkait Isu Kemanusiaan di Palestina Tahun 2024.” *Journal on Education* 7 (2): 11112–25.
- Quandt, William B. 1976. “Soviet Policy in the October 1973 War.” OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY OF DEFENSE INTERNATIONAL SECURITY AFFAIRS.
- Rachmadita, Amanda. 2023. “Soeharto, Yasser Arafat, dan Dukungan untuk Palestina.” *Historia.ID*, November 23. <https://www.historia.id/article/soeharto-yasser-arafat-dan-dukungan-untuk-palestina-v5jwg>.
- Ramadhan, Azhar Bagas. 2023. “Retno Marsudi Bersama Menlu OKI ke Paris-London Bahas Gaza, Ini Hasilnya.” *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-7053474/retno-marsudi-bersama-menlu-oki-ke-paris-london-bahas-gaza-ini-hasilnya>.
- Reuters. 2025. “Studi: Korban Tewas Perang Gaza Bisa Tembus 40% Lebih Banyak.” *VOA Indonesia*, Januari 11. <https://www.voaindonesia.com/a/studi-korban-tewas-perang-gaza-bisa-tembus-40-lebih-banyak/7933189.html>.
- Roesnadi, Sutomo. 2023. “Hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah.” *Analisis CSIS*, no. 3: 248–67.
- Rukmana, Lisa, dan Merci Robbi Kurniawanti. 2024. “Indonesia’s Role in the Israeli Occupation of Palestinian Territories: New Order Era to The Reformation.” *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 12 (2): 723. <https://doi.org/10.24127/hj.v12i2.10227>.
- Salim, Yuni. 2023. “Sidang Majelis Umum PBB soal Konflik Israel-Hamas di tengah Kebuntuan di Dewan Keamanan.” *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/sidang-majelis-umum-pbb-soal-konflik-israel-hamas-di-tengah-kebuntuan-di-dewan-keamanan/7329278.html>.
- Saragih, Hendra Maujana. 2019. “Kebijakan luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka Pada Masa Pemerintahan Jokowi.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3 (2): 133. <https://doi.org/10.29240/jf.v3i2.601>.
- Setiawati, Siti Mutiah. 2024. “The role of Indonesian government in middle east

- conflict resolution: consistent diplomacy or strategic shifts?" *Frontiers in Political Science* 6 (Maret): 1304108.
<https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304108>.
- Sidiq, Fahmi, Jumadil Saputra, dan Lotfi Tadj. 2024. "Indonesia's Role in Supporting Palestinian Independence and Responding to the Israeli-Palestinian Conflict: Analysis of Foreign Policy and Current Issues." *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 1 (4): 72–77.
<https://doi.org/10.46336/ijhlp.v1i4.45>.
- Skriabina, Viktoriia. 2018. "LINGUISTIC ASPECTS OF PERSUASION IN DIPLOMATIC DISCOURSE." *International Relations: Theoretical-Practical Aspects* 0 (2): 265–74.
<https://doi.org/10.31866/2616-745x.2.2018.133362>.
- Suratiningsih, Dewi. 2020. "Diplomasi Pemerintah Indonesia Dan Ngo Kemanusiaan Indonesia Dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020." *PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 25 (1): 11–28.
<https://doi.org/10.26418/proyeksi.v25i1.2602>.
- Tegenaw, Tekle Getahun, dan Xiaolong Zou. 2024. "The Role of International Organizations in Conflict Resolution: A Comparative Analysis of the United Nations and the African Union." *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)*, November 22, 504–15.
<https://doi.org/10.38124/ijisrt/IJISRT24NOV065>.
- Tempo. 2003. "Megawati Pertanyakan Langkah PBB Tangani Konflik Palestina." *Tempo*, Agustus 15.
<https://www.tempo.co/arsip/megawati-pertanyakan-langkah-pbb-tangani-konflik-palestina-2039237>.
- UN Security Council. 1974. "Security Council resolution 338 (1973) [on a cease-fire in the Middle East]." UN Security Council.
<https://digitallibrary.un.org/record/93466?v=pdf>.
- UN Security Council. 2002. "Security Council resolution 1402 (2002) [on cessation of all acts of violence in the territories occupied by Israel and resumption of the peace process]." UN Security Council.
<https://digitallibrary.un.org/record/460899?v=pdf>.

- United Nations. 1947. "Resolution 181 (II). Future government of Palestine." United Nations.
<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-185393/>.
- Vitaloka, Jessica Reza. 2025. "HAMBATAN PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL OLEH PBB (STUDI KASUS: ESKALASI KONFLIK 7 OKTOBER 2023)." Universitas Lampung.
- Wangke, Humphrey. 2018. "Dukungan Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 10 (2): 7–12.
- Widjajanto, Andi. 2025. "Pergeseran Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina dan Israel." *Laboratorium Indonesia* 45.
<https://www.lab45.id/detail/387/indonesia-s-shifting-foreign-policy-on-palestine-and-israel-#>.
- Wulandari, Tri Ratna, Kalina Alya, Disha Yori Farhana, dan Yusawinur Barella. 2024. "The Successful Journey of a Diplomat and Negotiator Case Study of Mrs. Retno Marsudi." *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1 (2): 298–310.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2014. "Surat Terbuka Presiden SBY Kepada Pemimpin Dunia Tentang Krisis Kemanusiaan di Gaza." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, Juli 31.
<https://setkab.go.id/surat-terbuka-presiden-sby-kepada-pemimpin-dunia-tentang-krisis-kemanusiaan-di-gaza/>.
- Zaini, Nida Meirina, Angga Nurdin Rachmat, dan Jusmalia Oktaviani. 2024. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Israel-Hamas Tahun 2023-2024." *Global Insight Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 1 (1).
<https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2489>.
- Zuhdi, Fadhlan, Sri Milawati Asshagab, Khoiru Rizqy Rambe, dan Resti Prastika Destiarni. 2024. "The Competitiveness and Export Performance of Indonesian Coffee in The Organization of Islamic Cooperation (OIC)." *IJBE (Integrated Journal of Business and Economics)* 8 (3): 311.
<https://doi.org/10.33019/ijbe.v8i3.939>